

Tugas Berat Jenderal Tito dan Peran Muhammadiyah

Rabu, 20-07-2016



MUHAMMADIYAH.OR.ID, JAKARTA – Permasalahan kemiskinan dinilai masih menjadi penyebab tingginya tingkat kejahatan di Indonesia. Di daerah-daerah yang miskin lah, mayoritas menunjukkan aksi kriminalitas dapat terjadi.

“Tujuh puluh tahun merdeka, tapi kita memang agak ironis dan miris, karena masih didominasi oleh kelas bawah,” ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian saat menghadiri Silaturahmi Idul Fitri 1437 H, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Senin (18/7).

Tito menuturkan, kemiskinan sangat erat hubungannya dengan keamanan dan ketertiban nasional. Karena itu, tugas mengentaskan kemiskinan di Indonesia, akan berdampak pada menurunnya angka kriminalitas.

Walaupun, kata dia, banyak juga pemikir yang berpendapat bahwa tidak ada korelasi yang kuat antara kemiskinan dan kriminalitas. Contohnya di Amerika Serikat, kelas menengahnya maju, namun kejahatannya juga tetap ada terjadi. Namun tak dipungkiri, terang Tito, di Indonesia, kejahatan sering terjadi di tempat-tempat kantong kemiskinan.

Karena itu, selain menjadi tugas pemerintah, Tito pun mengatakan, Polri mengharapkan elemen lain, seperti organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia, Muhammadiyah, dapat lebih berperan mengentaskan kemiskinan yang ada. “Kemudian mampu membawa pencerahan dengan sosial dakwahnya,” ucapnya di hadapan warga Muhammadiyah dalam acara tersebut.

Tito melihat, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia masih seperti piramida. “Penduduk kita dari segi kesejahteraan, masih menjadi piramida segitiga. Yang sebaiknya lah segitiga, kalau bisa segitiga terbalik, paling tidak jajargenjang, dimana kelas menengahnya ada di bagian tengahnya yang besar,”

jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Anwar Abbas mengatakan, pemerintah maupun masyarakat harus waspada terhadap nilai indeks Gini di Indonesia.

"Hati-hati agar indeks Gini ini tidak semakin meningkat," tutur Anwar kepada Muhammadiyah.or.id, Rabu (13/7).

Indeks Gini Indonesia, kata Anwar, sudah mencapai 0,43 dari rentang indeks 0-1. Ini, untuk mengukur tingkat ketimpangan atau kesenjangan ekonomi secara menyeluruh.

Anwar membandingkan Indonesia dengan Timur Tengah yang mencapai indeks Gini 0,45. Dalam kondisi indeks tersebut, ujarnya, terjadi *Arab Springs* yaitu kejadian unjuk rasa dan perlawanan masyarakat untuk menunjukkan rasa kekecewaannya terhadap kondisi sosial, ekonomi dan politik yang dianggap otoriter.

Hal ini seperti yang terjadi di Mesir ketika rakyatnya menginginkan Presiden Mesir, Husni Mubarak, mundur dari jabatannya. Begitu pula yang terjadi di Libya ketika masa pemerintahan Muammar Gaddafi.

"Hal ini tentu saja sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan," ungkap Anwar menyoal kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di Indonesia.

Menurut dosen ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini, kesenjangan ekonomi di Indonesia meningkat akibat tidak meratanya perkembangan ekonomi kelas menengah seperti yang terjadi saat ini.

"Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kita sudah semakin lebar dan melebar," terang dia.

Anwar pun menilai bahwa Indonesia harus berusaha agar ekonomi negara tidak hanya berkembang namun juga harus merata.

Saat ini, papar Anwar, 1% penduduk (kalangan atas) menguasai 43% ekonomi nasional. Namun, lanjut dia, 99% penduduk (menengah dan bawah) hanya menguasai 57% dari perekonomian nasional.

"Kalau hal ini terus berlanjut maka masyarakat akan mudah disulut dan diprovokasi," ujar Anwar mengharapkan perubahan perekonomian Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Soal kesenjangan itu pun, Tito Karnavian, Kapolri yang belum lama dilantik oleh presiden ini mengatakan, memang menjadi perhatian khusus bagi kepolisian. "Akibat adanya *gap* antara *the have and the have not* ini cukup tinggi. Ini juga salah satu kekhawatiran bagi kami kepolisian," katanya.

Ketika kesenjangan ekonomi ini terjadi, menurut mantan Kapolda Metro Jaya itu, maka otomatis tugas kepolisian akan lebih berat. "Karena kriminalitas akan menaik," tambahnya memberitahukan.

Terkait kesenjangan ini pun, kata Tito, menjadi salah satu tanggungjawab bersama baik pemerintah, masyarakat, tak terkecuali organisasi pembaharu Muhammadiyah. Karena itu, dalam kesempatannya, Tito pun mengajak Muhammadiyah dapat bekerjasama dengan pemerintah menurunkan angka ketimpangan atau kesenjangan itu.

Di sisi lain, Ketua PP Muhammadiyah, Muhammad Busyro Muqoddas mengatakan, Jenderal Pol Tito Karnavian akan semakin diuji dalam memimpin Polri saat ini. Yakni untuk menciptakan rasa nyaman dan aman bagi masyarakat Indonesia.

"Berharap Pak Tito pimpin Polri dengan penuh kejujuran," katanya kepada wartawan di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (15/7). Berbagai bentuk kejahatan, harus benar-benar diberantas oleh

kepolisian. Tak terkecuali, kata Busyro, kejahatan terorisme dan korupsi yang ada di Indonesia.

Kemudian, disamping harus melaksanakan tugas utamanya, Polri, menurut Busyro, kini dihadapi masalah internal yang cukup serius. Kata Busyro, mengutip Tito, masih banyak polisi yang hedonis dan pragmatis di Polri.

“Nah sekarang, mudah-mudahan Pak Kapolri tidak butuh waktu lama untuk melakukan satu evaluasi terhadap manajemen,” katanya. Ini untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian.

Busyro juga menyarankan agar Polri dapat bekerjasama dengan KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia. Terkhusus, ujar dia, Polri harus mengevaluasi manajemen Korlantas Polri sendiri.

Lalu, ihwal pemberantasan terorisme, Busyro mendorong agar Polri lebih terbuka. Ia menambahkan, kepolisian harus melakukan penelitian dan mendesain konsep mengenai akar ideologi radikalisme atau terorisme. Penelitian ini untuk menjadi bahan dalam menangani pemberantasan terorisme yang ada di Indonesia.

Namun, catatan penting, kata dia, penelitian ini tidak hanya dilakukan sendiri oleh kepolisian. “Kami siap membantu mendampingi kepolisian melakukan penelitian,” ujar Busyro yang menjadi salah satu anggota Tim Evaluasi Penanganan Terorisme bentukan Komnas HAM ini.

Lebih lanjut, sambung Busyro, hal yang penting dilakukan oleh Polri adalah evaluasi pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpil). “Pendidikan di Akpil dan seterusnya harus dilakukan evaluasi,” katanya. Jika evaluasi pendidikan itu tidak dilakukan, menurut dia, Polri tidak akan mengalami kemajuan yang signifikan.

Ia juga menilai, jika tugas kepolisian ini dilakukan dengan profesional, serius dan penuh kejujuran, maka keamanan dan kenyamanan di Indonesia akan benar-benar terwujud. Hal ini akan mendorong kepercayaan publik semakin meningkat.

Dan lagi, apabila kondisi tersebut tercipta, tutur Busyro, investor-investor Indonesia akan semakin yakin dengan stabilitas keamanan di Indonesia. Bahkan, kata dia, akan mengundang para calon investor lainnya.

Sementara itu, Kapolri Tito Karnavian mengatakan bahwa kepolisian merupakan institusi penting yang sangat menentukan nasib suatu bangsa. Polri, kata dia, adalah aset bangsa yang sangat berpengaruh dalam dinamika yang ada di Indonesia.

Tito memberitahukan, pekerjaan kepolisian memang sangat tidak mudah. Banyak sekali, katanya, kritikan-kritikan yang diterima oleh Polri. Hal ini menunjukkan meningkatnya ekspektasi masyarakat kepada Polri, terutama setelah dipisahkannya Polri dari ABRI.

Ekspektasi itupun, terangnya, menjadi evaluasi tersendiri bagi kepolisian. “Ekspektasi masyarakat itu mulai cenderung, kurvanya, menurun akhir-akhir ini,” ujar dia memberitahukan tentang ekspektasi masyarakat yang dinilai jauh dari harapan.

Banyak masalah di internal Polri, kata Tito. Dimulai dari masalah kekerasan yang eksekutif, kemudian budaya arogan kekuasaan dan lainnya. “Itu menjadi tantangan-tantangan internal bagi kami,” ucapnya.

Itu juga, ujar Tito, menjadi tugasnya selaku pimpinan untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Polri agar naik kembali. Tak sungkan juga, dalam kesempatannya, Tito menginginkan bekerjasama dengan Muhammadiyah untuk mewujudkan kepercayaan publik tersebut.

“Oleh karena itu, itu yang kami harapkan, kami berusaha membangun Polri untuk lebih baik, dipercaya publik. Dan itu akan menjadi senjata yang terkuat bagi kepolisian nantinya ke depan. Jadi senjata yang

lain itu hanya senjata tambahan saja,” katanya.

Di acara Silaturahmi Idul Fitri tersebut pun, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan harapan besarnya kepada Tito dalam memimpin Polri. Muhammadiyah menginginkan Tito dapat mengemban amanat yang luhur sebagai Kapolri.

Haedar menuturkan, Polri harus terbuka untuk menerima berbagai masukan berupa kritik dari masyarakat. “Banyak kritik, itu bentuk kecintaan kami,” kata Haedar memberitahukan Tito ihwal Muhammadiyah yang kritis terhadap Polri.

Muhammadiyah pun, Haedar melanjutkan, siap untuk bekerjasama dengan kepolisian untuk menjalankan dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

“Meskipun berat, Muhammadiyah akan bersama Bapak,” tutur Haedar memberikan dukungan kepada Tito Karnavian.

Reporter: Ilma Aghniatunnisa

Redaktur: Ridlo Abdillah